

LEMBAGA LENSA DIKLAT NASIONAL (LEDIKNAS)



KANTOR SEKRETARIAT :
Jalan Taruna V Nomor 44 Kemayoran, Jakarta Pusat
10650 DKI Jakarta Indonesia
Telp/Fax (021) 21478758
Kontak Person: 082112366662; 0811180721
Portal Web <https://www.lediknas.com> | Email :
lediknas@gmail.com

A. LATAR BELAKANG

Penerapan good governance merupakan sebuah keharusan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, bertanggungjawab penuh atas pengelolaan sumberdaya dan berorientasi pelayanan publik. Pada beberapa negara maju, disamping meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya publik, penerapan good governance juga mendorong berkembang-tumbuhnya iklim dan praktik demokrasi yang sehat dalam bidang ekonomi, hukum, politik, dan berbagai aspek pembangunan lainnya.

Penyelenggaraan pemerintahan yang mengadopsi prinsip-prinsip good governance membutuhkan kesiapan perangkat pendukungnya dan sumber daya manusia (SDM). Salah satu kebutuhan mendesak adalah peningkatan kapasitas penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, yang menjadi sebuah keniscayaan untuk membangun suatu penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang baik sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Didorong oleh semangat untuk berpartisipasi meningkatkan akuntabilitas pengelolaan sumber daya manusia, Lembaga LEDIKNAS didirikan tanggal 14 maret 2018 dengan akta notaris ZAINUDDIN, SH nomor 164 tanggal 29 maret 2018 dan dengan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004595.AH.01.07. TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Lensa Diklat Nasional bertujuan mengembangkan profesionalisme dan kompetensi untuk memberikan sumbangsih dan memainkan peran membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kapasitas perencanaan, pengelolaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di daerah melalui pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek), pendidikan dan pelatihan (Diklat), pendampingan, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, kajian, analisis, dan penelitian dalam bidang pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan kapasitas SDM Pemerintahan Desa.

LENSA DIKLAT NASIONAL

B. VISI

Bersama LEDIKNAS menghadapi perkembangan dan persaingan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

C. MISI

1. Mendukung dan mengembangkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, profesional dan akuntabel;
2. Memperkuat peningkatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan sumberdaya public;
3. Melakukan analisis/kajian implementasi kebijakan publik untuk mendukung peningkatan akuntabilitas; dan
4. Memperkuat peran-peran strategis untuk peningkatan akuntabilitas kebijakan publik bagi pemerintah, swasta dan publik - atau - Memperkuat peran-peran publik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan sektor publik dan swasta.

D. ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

BERDASARKAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN LEDIKNAS:

1. Lembaga ini berasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

MAKSUD DAN TUJUAN LEMBAGA

1. Turut serta aktif dalam pembangunan nasional untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
2. Turut serta berusaha untuk membantu pemerintah republic Indonesia dalam memajukan pendidikan umum, kesejahteraan dan keamanan bagi kepentingan bangsa dan Negara;
3. Melakukan pendekatan-pendekatan dan bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat dalam upaya menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjamin terlaksananya secara bebas dan bertanggungjawab, fungsi, tugas dan hak-hak masyarakat memperoleh, menyalurkan dan menyatakan pendapat, melakukan control social dan terjaminnya hak masyarakat memperoleh informasi yang lengkap, akurat dan obyektif;
4. Untuk **menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Seminar, Lokakarya, Simposium, Diskusi. Temu Wicara dan atau ceramah-ceramah yang bersifat Sosialisasi dan Bimbingan Teknis** serta pemahaman tentang mekanisme penerapan program-program dan kebijakan pemerintah, dalam rangka mewujudkan percepatan dan pemerataan dalam pelaksanaan pembangunan nasional;

5. Menendirikan balai-balai pelatihan dan keterampilan, pendidikan umum khususnya pendidikan kewarganegaraan bagi seluruh komponen masyarakat bangsa dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara khusus tujuannya:

1. Menyelenggarakan pelatihan, pendidikan dan peningkatan SDM dalam skala nasional berbasis kompetensi melalui forum **Bimbingan Teknis (BIMTEK), DIKLAT, WORKSHOP dan Study Banding/Lapangan**;
2. Meningkatkan kompetensi bagi para aparatur daerah legislatif maupun eksekutif untuk perbaikan pelayanan publik dasar;
3. Peningkatan Kapasitas fungsi aparatur daerah untuk perbaikan pelayanan publik dasar;
4. Untuk memberikan pengetahuan baru kepada aparatur daerah untuk perbaikan pelayanan publik dasar;
5. Bekerja sama dan bersinergi dengan Pemerintah, Lembaga Legislatif, Donor dan Mitra Pembangunan lainnya, Lembaga Studi/Penelitian, Universitas serta mitra strategis lainnya dalam upaya mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan sumberdaya public;
6. Melaksanakan diskusi, analisis dan kajian obyektif mengenai implementasi kebijakan public; dan
7. Mengembangkan software/sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah berbasis computer.

E. LEDIKNAS bekerja berdasarkan empat nilai berikut:

1. **SINERGI**. Bekerja dan mengembangkan kerjasama produktif serta kemitraan harmonis untuk menghasilkan sumbangsih yang berkualitas dan bermanfaat;
2. **PROFESIONALISME**. Bekerja atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen tinggi;
3. **KREATIF**. Bekerja secara profesional dan inovatif, mendorong dan memfasilitasi gagasan/solusi, hasil yang berkualitas, dan memberikan yang terbaik; dan
4. **BERTANGGUNGJAWAB**. Bekerja dengan tanggungjawab atas kegiatan yang diselenggarakan/ terselenggara.

F. PROGRAM KERJA & PENGALAMAN KERJA

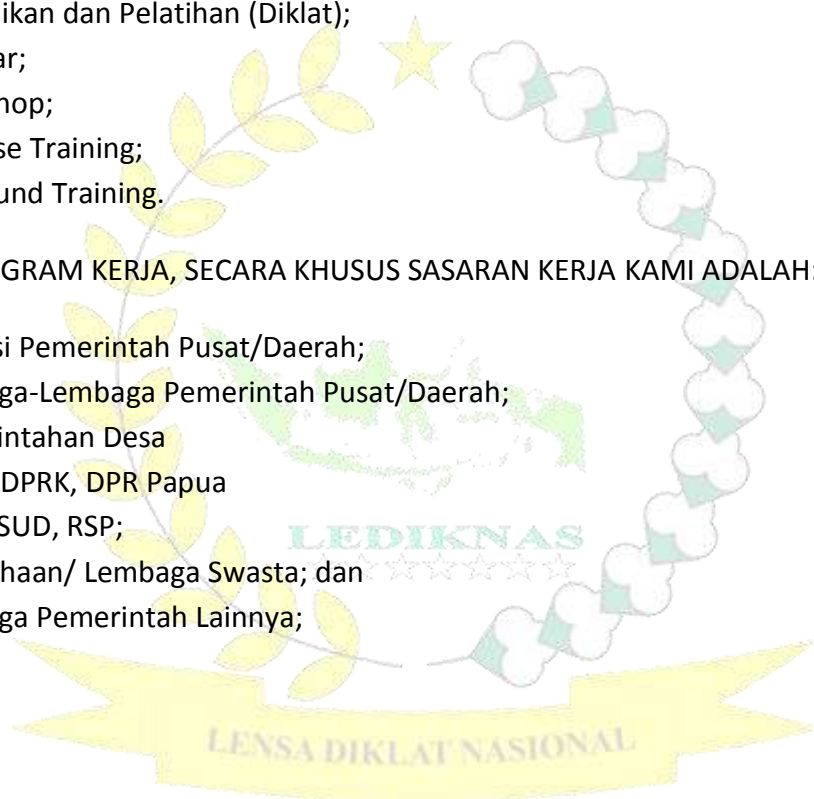
Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan tersebut Lembaga LEDIKNAS mengembangkan program kerja bekerja sama dengan segenap pemangku kepentingan diantaranya: Kemendagri; Kemenkeu; Kemenpan RB; BKN; BPK; KPK; LKPP; KemenkumHAM; Kementerian BPN/Bappenas; Kementerian Agraria & Tata Ruang; Kemen LHK; Kemen PUPR; Kementerian Perhubungan; Kementerian Pertanian; Kemensos; Kemenpora; PEMDA; & Dosen, Tenaga Ahli atau Aktivis baik Individu maupun dari Perguruan Tinggi/Universitas

BENTUK PROGRAM KERJA, SECARA KHUSUS SYSTEM KERJA KAMI ADALAH:

- 1) Bimbingan Teknis (Bimtek);
- 2) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
- 3) Seminar;
- 4) Workshop;
- 5) In house Training;
- 6) Outbound Training.

SASARAN PROGRAM KERJA, SECARA KHUSUS SASARAN KERJA KAMI ADALAH:

- 1) Instansi Pemerintah Pusat/Daerah;
- 2) Lembaga-Lembaga Pemerintah Pusat/Daerah;
- 3) Pemerintahan Desa
- 4) DPRD, DPRK, DPR Papua
- 5) RSU, RSUD, RSP;
- 6) Perusahaan/ Lembaga Swasta; dan
- 7) Lembaga Pemerintah Lainnya;



PROGRAM KERJA

Secara khusus program kerja LEDIKNAS adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Bimbingan Teknis, Diklat maupun Study Banding bagi segenap Aparatur OPD dan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, berikut ini bidang kegiatan yang secara khusus kami selenggarakan:

BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)
<u>Bimtek Bidang Keuangan</u>
<u>Bimtek Bidang Aset Daerah</u>
<u>Bimtek Bidang DPRD/SETWAN</u>
<u>Bimtek Bidang Kepegawaian</u>
<u>Bimtek Bidang Kec/Distrik/Desa/Kampung</u>
<u>Bimtek Bidang Pajak</u>
<u>Bimtek Bidang Kearsipan</u>
<u>Bimtek Bidang Perencanaan</u>
<u>Bimtek Bidang Humas Protokol</u>
<u>Bimtek Bidang Pertanahan</u>
<u>Bimtek Bidang Tata Ruang</u>
<u>Bimtek Perjalanan Dinas</u>
<u>Bimtek Bidang PBJ</u>
<u>Bimtek Bidang BLUD</u>
<u>Bimtek Bidang Umum</u>

PENGALAMAN KERJA

Secara khusus program kerja LEDIKNAS adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Bimbingan Teknis, Diklat maupun Study Banding bagi segenap Aparatur OPD dan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, berikut ini sekilas tema-tema kegiatan dan para INSTANSI KEMENTERIAN, PEMDA, RSUD serta Perguruan Tinggi, yang bekerjasama dan telah diselenggarakan kegiatannya:

NO.	TEMA KEGIATAN	PROVINSI, KABUPATEN/ KOTA
1	Bimtek Master Of Ceremony (Mc) Dan Public Speaking Serta Optimalisasi Manajemen Kehumasan Dan Keprotokolan Di Dalam Pelayanan Tamu Daerah	Dinas Pendidikan Kab. Padang Lawas Utara
2	Bimtek Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Terkait Perencanaan, Penatausahaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban	Dinas Pendidikan Kab. Pegunungan Arfak
3	Bimtek Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	DPKP & Lingkungan Hidup Kab. Pegunungan Arfak
4	<ol style="list-style-type: none"> Bimtek Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan Dan Penguatan Kinerja PNS Bimtek Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan RKA Dan DPA Instansi Pemerintah Bimtek Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Dan Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Berdasarkan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 Serta Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) ASN Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIMPEG) 	Dinas Perusda dan Arsip Kab. Merauke (terselenggara dlm beberapa angkatan)

	6. Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan IT / Multimedia	
5	1) Bimtek Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Serta Pedoman Penyusunan Renstra 2) Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Sap Menuju Opini WTP	Satpol PP Provinsi Papua Terlaksana II Kegiatan
6	Bimtek Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	OPD dan SETDA Kab. Kupang
7	1. Bimtek Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD TA. 2019 Berdasarkan Permendagri No. 38/2018, Penyusunan RKPD Tahun 2019 (Permendagri No. 22/2018) Serta Sosialisasi UU No. 10/2016 2. Bimtek Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah 3. Pembaharuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 4. Bimtek Sosialisasi Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 5. Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Serta Pedoman Penyusunan APBD TA. 2020 Berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 6. Optimalisasi, Fungsi Dan Peran DPRD Dalam Proses Penyusunan Dan Penetapan APBD	DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Gunung Mas (terselenggara dlm beberapa angkatan)
8	Penanganan Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan	Badan Kesbangpol Kab. Pegunungan Arfak
9	Efektifitas, Efisiensi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Hibah Dan Bansos Berdasarkan Permendagri RI No. 13/2018	BPKAD Provinsi Maluku Utara
10	Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Pemerintah Serta Penyampiannya	Para OPD Se-Kabupaten Tapanuli Selatan
11	Sinergitas Dan Regulasi Perencanaan Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Tentang Rencana Tata Ruang Daerah	Dinas PUPR Kab. Morowali Utara
12	Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)	BKPSDM Kab. Jayawijaya II Angkatan
13	Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)	BPKAD Kab. Nabire
14	Bimtek Implementasi Permendagri No. 86 Tahun 2017	Bappeda Kab. Yalimo
15	Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Serta Laporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Aparatur Distrik Sekabupaten Keerom
16	Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Serta Laporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Pemerintahan Desa Sekabupaten Enrekang
17	Bimtek Implementasi Permendagri No. 86 Tahun 2017	OPD BALITBANGDA Dan BAPPEDA Kabu. Timor Tengan Selatan
18	Bimtek Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Sap Menuju Opini WTP	Sekretariat Dewan Kawasan PBBB Bintan Karimun
19	Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD Terhadap Manajemen Persidangan, Risalah/ Rapat Dan Kedudukan Setwan Dalam Menunjang Kinerja DPRD	Sekretariat DPRD Kab. Poso
20	Bimtek Sinergitas Dan Regulasi Perencanaan Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Tentang Rencana Tata Ruang Daerah	Dinas PU Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Merauke
21	Bimtek Sinergitas Dan Regulasi Perencanaan Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Tentang Rencana Tata Ruang Daerah	Dinas PUPR Kota Ambon
22	Bimtek Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019 Berdasarkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 Dan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akruar	SETDA dan OPD Kab. Buru Selatan
23	1. Bimtek Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Bimtek Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akruar Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018	BAPPEDA Kab. Empat Lawang (terselenggara dlm beberapa angkatan)
24	Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Dan Pembantu Bendahara Pemerintah Serta Penyampiannya	Satpol-PP Provinsi Kalimantan Barat
25	Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Dan Pembantu Bendahara Pemerintah Serta Penyampiannya	Dinas Pertanian Kota Padang
26	1. Bimtek Instrumen Tunjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) 2. Bimtek Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) 3. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Serta Penilaian Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2018 4. Manajemen Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah Dan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIMPEG) Serta Sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang	BKPSDM Kab. Maluku Tenggara (terselenggara dlm beberapa angkatan)

	Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 5. Penilaian Kinerja PNS 6. Penetapan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)	
27	Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 135 Tahun 2017 Serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Bappeda Provinsi Maluku
28	1. Bimtek Pengelolaan Keamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah 2. Bimtek Jurnalistik Dan Kehumasan	Diskominfo Kab. Kupang
29	1. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara, Pembantu Bendahara Dan PPTK Pemerintah Serta Penyampiannya 2. Bimtek Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2019 Serta Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Berdasarkan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 3. Manajemen Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah Dan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (Simpeg) Serta Sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik Daerah Prov. Sulawesi Utara
30	Bimtek Sosialisasi Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	SETDA Kab. Halmahera Selatan
31	Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Dan Pembantu Bendahara Pemerintah Serta Penyampiannya	RSUD Petala Bumi Provinsi Riau
32	Bimtek Pencatatan Dan Optimalisasi Administrasi Pertanahan	BP Kota Batam
33	1. Bimtek Penatausahaan Keuangan Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Bendahara 2. Bimtek Master Of Ceremony (Mc) Dan Public Speaking Serta Optimalisasi Manajemen Kehumasan Dan Keprotokolan Di Dalam Pelayanan Tamu Daerah 3. Bimtek Manajemen Kepegawaian, Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) Dalam Pp 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pns Dan Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi PNS	Sekretariat DPRD Kab. Deiyai (terselenggara dlm beberapa angkatan)
34	Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Rangka Persiapan Badan Layanan Umum Daerah	RSUD Lewoleba Kab. Lembata
35	Analisis Beban Kerja (ABK)"	SETDA Kab. Halmahera Selatan
36	Bimtek Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Dan Penerapan SPM	Aparatur Camat dan Desa Kab. Belitung Timur
37	Regulasi Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005	BPKPAD Kab. Pakpak Bharat
38	Bimtek Regulasi Baru Kebijakan Pertanahan Nasional Dan Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahan	SETDA Kab. Manokwari
39	Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bakesbangpol Prov. Papua Barat
40	Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Serta Laporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Sekaligus Kunjungan Kerja Ke Desa Tanjung Jaya Kec. Panimbang Kab. Pandeglan - Banten	Aparatur Distrik dan Kepala Kampung Kab. Mamberamo Raya
41	Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 135 Tahun 2017 Serta PP Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	BPKAD Kab. Nabire
42	Bimtek Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Daerah	BPKAD Kab. Kotawaringin Barat
43	Bimtek Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)	SETDA dan Para OPD Kab. Buton Selatan
44	Bimtek Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Aparatur Distrik dan Kepala Kampung Kab. Keerom
45	Bimtek Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	Badan Kesbangpol Kab. Intan Jaya
46	Bimtek pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) di lingkungan pemerintah daerah	SETDA Kab. Mimika
47	Bimtek Penyusunan Dan Penilaian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)	Dinas PUPR Kab. Sarmi
48	Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Serta Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 Dan Permendagri No. 86 Tahun 2017	SETDA Kab. Kupang
49	Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Serta Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 Dan Permendagri No. 86 Tahun 2017	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Dairi
50	Bimtek Mekanisme Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan	Aparatur Camat dan Desa Kab. Belitung Timur
51	Bimtek Sosialisasi Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	SETDA Kab. Sumba Barat
52	Bimtek Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	SETDA Kota Palembang
53	Bimtek Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru

54	Bimtek Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Dan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD Kab. Poso
55	Bimtek Tugas Dan Fungsi Pemerintahan Desa Serta Persiapan Perencanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2020	Aparatur Camat, Kades & Perangkat Desa Kab. Kepulauan Talaud
56	Bimtek Audit Intern Inspektorat Daerah Sebagai Aparatur Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Inspektorat Kab. Gunung Mas
57	Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Pemerintah Serta Penyampaiannya	Diskominfo Prov. Sulawesi Tenggara
58	Bimtek Pelayanan Administrasi Terpadu Di Lingkungan Pemerintahan Desa	Aparatur Camat dan Desa Kab. Belitung Timur
59	Bimtek Disiplin Pegawai ASN Dan Implementasi Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
60	Master Of Ceremony (MC) Dan Manajemen Protokol Pemerintah Daerah	SETDA Kab. Biak Numfor
61	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019	BPKAD Kab. Mamberamo Tengah
62	Pelayanan Administrasi Terpadu Pemerintahan Desa Dan Prioritas Dana Desa Ta. 2021 Berdasarkan Permendes PDPT No. 13 Tahun 2020	Aparatur Camat, Kades & Perangkat Desa Kab. Kepulauan Talaud
63	Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Fakultas Pertanian Univ. Pattimura Ambon
64	Manajemen Kepegawaian Berbasis Penilaian Kinerja Prestasi, Penilaian Kinerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Dinas Pertanian Kab. Kutai Barat
65	Manajemen Pelayanan Publik Bagi Aparatur Pemerintahan Desa	Aparatur Camat dan Desa Kab. Belitung Timur
66	Penatausahaan Keuangan Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Bendahara	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Sula
67	Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Serta Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Renstra OPD	Dinas Komunikasi & Informatika Prov. Sulawesi Tenggara
68	Arah Kebijakan Rancangan Dan Penyusunan Peraturan Daerah Pasca Diberlakukannya UU Cipta Kerja	SETDA Kab. Halmahera Selatan
69	Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Serta Sinkronisasi Penerapan SIPD Dalam Permendagri NO. 70/2019, Permendagri NO. 90/2019 Dan PP NO. 12/2019	Para OPD Kab. Intan Jaya
70	Memanfaatkan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah/Sopd Sesuai : PP No. 12 Tahun 2019 - Permendagri No. 90 Tahun 2019	Para OPD Kab. Maluku Barat Daya
71	Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Berdasarkan Permendagri No. 99/2019 Perubahan Kelima Permendagri 32/2011	Para OPD Kota Ambon
72	Arah Kebijakan Penerapan Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	SETDA dan Para OPD Kab. Biak Numfor
73	Arah Kebijakan Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Manokwari Selatan
74	Peran Dan Fungsi Aparatur Desa Dan Kecamatan Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	Aparatur Camat dan Desa Kab. Belitung Timur
75	Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Permendagri No. 70/2019, Permendagri No. 90/2019 Dan PP No. 12/2019	DPMPTSP Prov. Papua
76	Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	RSU BAHTERAMAS Provinsi Sulawesi Tenggara
77	Penyusunan Dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	SETDA Kab. Nabire
78	Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021	Para Staf Khusus Gubernur Papua
79	Manajemen Pengelolaan Dan Optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Ekonomis	RSBG Kabupaten Kolaka
80	Sinkronisasi Pelaksanaan Peran Dan Fungsi BPD Dan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Desa Sesuai Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Para Kades, Perangkat Desa & BPD kab. Sinjai
81	Sinkronisasi Pelaksanaan Peran Dan Fungsi BPD Dan Pemerintah Desa Serta Peranan PKK Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Desa Dimasa Pandemi Covid-19	Aparatur Camat, Kades & Perangkat Desa Kab. Kepulauan Talaud
82	Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Serta Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Inspektorat Kab. Intan Jaya
83	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Dan Penerapan SPM	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Kaimana
84	Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup OPD	SETDA Kab. Seram Bagian Timur
85	Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Serta Akuntansi Aset Tetap Dan Penyusutan Aset Tetap	BPKAD Kabupaten Waropen
86	Sosialisasi Permendagri Nomor 47 Tahun 2021	RSUD Dr. Abdul Rivai Kab. Berau

G. SEKILAS DOKUMENTASI KEGIATAN BIMTEK KAMI



BAGIAN HUKUM SETDA MIMIKA



SATPOL PP MAHAKAM ULU



DINAS KESEHATAN DOGIYAI



OPD SE PANIAI



DINAS PUPR MAMASA



DISTRIK MAMBERAMO HILIR & TENGAH



PEMERINTAH KAMPUNG SARMI



SETWAN PAPUA PEGUNUNGAN



DINAS PERIKANAN KUTAI BARAT



BPKAD WAROPEN



OPD SE INTAN JAYA



BPKAD KABUPATEN KUPANG



PEMERINTAH DESA SE SINJAI



SETWAN DPRD DEIYAI



SETDA SULAWESI TENGGARA



DINAS KESEHATAN NABIRE




BPKAD MAMBERAMO RAYA



DINAS KELAUTAN PERIKANAN KALIMANTAN SELATAN

H. BIODATA

Nama Lembaga : LENA DIKLAT NASIONAL (LEDIKNAS)
Akta Pendirian : Notaris & PPAT, Zainuddin, SH
Nomor Akta : Nomor 164, Tanggal 29 Maret 2018
NIB : Nomor 1201000701512
NPWP : 42.988.278.0.027.000
Legalitas : SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0004595.AH.01.07. TAHUN 2018
Alamat : Jalan Taruna V Nomor 44, Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat 10650, DKI Jakarta
Logo : 
Pimpinan : Ketua Umum : Arifin Siregar, SE
Pengurus : Sekretaris : Ridwan
Bendahara : Umar Afif
Dewan pengawas : Dr. Drs. Akbar Ali, M,Si
Kemendagri RI : Alpin Rahman, S.STP., M.M
: M. Fikri Cahyadi, S.IP, MA

I. PENGURUS



J. PENUTUP

Suatu komitmen kolektif dan kebanggaan atas kesempatan untuk mendukung pengembangan SDM serta akselerasi pembangunan nasional. Disamping itu perbaikan, pengembangan serta pembangunan tidak hanya harus dibebankan kepada pemerintah, namun semua stakeholder mesti terpanggil untuk memberikan kontribusi nyata.

Kelahiran Lembaga LENSEA Diklat Nasional (LEDIKNAS) dalam kerangka untuk mengawal proses perjalanan dan tujuan berbangsa kita. Membangun bangsa harus dimaknai sebagai cita-cita besar kemerdekaan berlandaskan UU 1945 dan PANCASILA dalam kerangka bangsa BHINEKA TUNGGAL IKA.

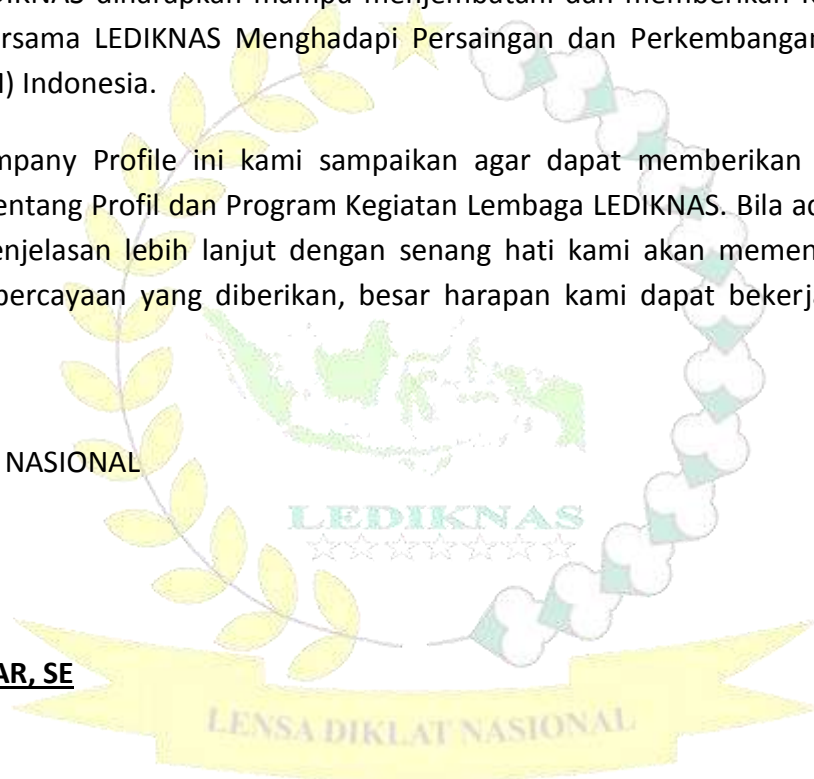
LEMBAGA LEDIKNAS diharapkan mampu menjembatani dan memberikan Kontribusi nyata sesuai Visi Bersama LEDIKNAS Menghadapi Persaingan dan Perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Demikian Company Profile ini kami sampaikan agar dapat memberikan informasi yang menyeluruh tentang Profil dan Program Kegiatan Lembaga LEDIKNAS. Bila ada hal-hal detail yang perlu penjelasan lebih lanjut dengan senang hati kami akan memenuhinya. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, besar harapan kami dapat bekerja sama dengan baik.

Hormat kami,
LENSA DIKLAT NASIONAL
LEDIKNAS

TTD & CAP

ARIFIN SIREGAR, SE
Kepala



Lampiran legalitas

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004595.AH.01.07.TAHUN 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LENSA DIKLAT NASIONAL**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ZAINUDDIN, SH , sesuai salinan Akta Nomor 164 Tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat oleh ZAINUDDIN, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LENSA DIKLAT NASIONAL disingkat LEDIKNAS tanggal 05 April 2018 dengan Nomor Pendaftaran 6018040531100213 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan tentang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LENSA DIKLAT NASIONAL disingkat LEDIKNAS;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN LENSA DIKLAT NASIONAL disingkat LEDIKNAS
Berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, sesuai salinan Akta Nomor 164 Tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat oleh ZAINUDDIN, SH , yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
 - KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 April 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 05 April 2018

**"Keputusan Menteri ini
dicetak dari SABH".**



ZAINUDDIN, SH.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
SUSUNAN PENGURUS



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004595.AH.01.07.TAHUN 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LENSE DIKLAT NASIONAL**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
TUAN ARIFIN SIREGAR	7315052103900001	PENGURUS	KETUA
TUAN RIDWAN	7315110201850003	PENGURUS	SEKRETARIS
TUAN UMAR ARIF	7315041905830002	PENGURUS	BENDAHARA
TUAN PRAYOGO	3171032803610005	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 April 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 April 2018

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1201000701512

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) LEDIKNAS
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Jalan Taruna V Nomor 44, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
NPWP	:	42.988.278.0-027.000
Nomor Telepon	:	02121478758
Nomor Fax	:	-
Email	:	lediknas@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	96999 - AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliryan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 11 Juli 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 11 Juli 2021

BUKU REKENING

Contoh Tanda Tangan **17 1 FEB 2022**

SUS



Pengesahan Petugas

No. TB 5418160

Kantor Cabang : KRAMAT
 No. Rekening : 1344804083 - IDR
 Nama : LENZA DIKLAT NASIONAL PERKUMF

17 - 52098

BNI CALL 1500046

BNI **NO. TB 5418160**

1. Penarikan BNI Taplus Bisnis dapat dilakukan di semua Teller BNI di dalam negeri, di BNI ATM, ATM LINK, ATM Bersama dan ATM Prima di seluruh Indonesia serta ATM berlogo Citrus atau Maestro di seluruh dunia.
2. BNI Taplus Bisnis dilengkapi dengan fasilitas Kartu Debit BNI dan BNI e-Banking yang memudahkan Anda dalam melakukan transaksi perbankan.

PERHATIAN:

1. Periksa buku BNI Taplus Bisnis Anda sebelum meninggalkan Bank.
2. Jika buku BNI Taplus Bisnis/Kartu Debit BNI hilang, agar segera memberitahu Bank.
3. Penarikan tunai dengan surat kuasa hanya dapat dilakukan di Kantor Cabang pembuka rekening dengan membawa buku BNI Taplus Bisnis dan menunjukkan asli identitas diri (KTP/SIM/Paspor) Pembari dan Penerima Kuasa.
4. Penyalahgunaan buku BNI Taplus Bisnis/Kartu Debit BNI oleh pihak ketiga yang bukan karena kesalahan Bank menjadi risiko/tanggung jawab penabung seluruhnya.
5. Penarikan di Teller harus menyertakan buku BNI Taplus Bisnis dan asli identitas diri yang berlaku. Penarikan dengan nominal tertentu di Teller yang rekeningnya memiliki fasilitas Kartu Debit BNI harus menyertakan Kartu Debit BNI.
6. Pembaharuan data nasabah agar dilaporkan kepada Bank.
7. Rekening yang tidak bertransaksi selama 6 bulan berturut-turut akan dinyatakan pasif (dormant). Rekening dormant dapat aktif kembali dengan transaksi setoran tunai ke rekening minimal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Nasabah pemilik/bukan Nasabah pemilik rekening melalui Teller. Transaksi penarikan tunai atau pencairan/bukukan debit rekening oleh Nasabah sendiri melalui Teller wajib membawa asli identitas diri yang berlaku, Buku Tabungan dan Kartu Debit BNI.
8. Rekening dormant yang tidak diaktifkan dan bersaldo nihil dalam jangka waktu tertentu akan otomatis ditutup oleh sistem.
9. Penggantian buku BNI Taplus Bisnis yang habis karena rusak/husuk dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI di dalam negeri.
10. Penggantian buku BNI Taplus Bisnis karena hilang yang memiliki fasilitas Kartu Debit dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI di dalam negeri.
11. Penggantian Kartu Debit BNI karena hilang/masa berlaku jatuh tempo/husuk dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI di dalam negeri.

Keterangan Kode Transaksi

1. Penyetoran	11. Akun Transaksi C	86. Biaya Penolakan Transaksi Citrus karena dana tidak cukup
2. Penarikan	12. Transaksi Debit Phone Banking	87. Biaya Penolakan Transaksi Citrus akibat hal-hal lain
3. Giring	21. Penarikan ATM	92. Reversal/Pembatalan ATM
4. Pencairan/Bukukan	22. Transaksi Kredit Phone Banking	94. Reversal/Pembatalan Maestro/POS
5. Pajak	24. Transaksi Maestro/POS	95. Reversal/Pembatalan Tarik Citrus/Link/Bersama/Prima
6. Bunga	25. Transaksi Tarik Citrus/Link/Bersama/Prima	96. Reversal/Pembatalan Biaya Inquiry Citrus/Link/Bersama/Prima
7. Pembetulan Kesalahan	26. Biaya Inquiry Citrus/Link/Bersama/Prima	97. Reversal/Pembatalan Pembayaran
8. Pemindahan Saldo	27. Pembayaran Pembayaran	98. Reversal/Pembatalan Biaya Tarik Citrus/Link/Bersama/Prima
9. Biaya Administratif	28. Biaya Tarik Citrus/Link/Bersama/Prima	
10. Akun Transaksi Db	42. Pemindahan melalui ATM	

NPWP

